

**Antara Stabilisasi dan Ketergantungan:
 Mengevaluasi Efektivitas MINUSTAH di Haiti**

*Between Stabilization And Dependency:
 Evaluating The Effectiveness Of MINUSTAH In Haiti*

Salsabila Aulia Irawan

Program Sarjana Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin, Indonesia.

Correspondent Author: salsabilaairawan@gmail.com

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Keywords:</p> <p>United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH), Haiti, Security Crisis, International Organizations, Humanitarian Intervention</p>	<p><i>This study analyzes the effectiveness of the United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) in addressing the security crisis and supporting state-building in Haiti, a fragile country. Using a qualitative approach based on literature, this study examines three main dimensions: security stabilization, political stability, and institutional capacity. The results show that MINUSTAH succeeded in reducing violence and supporting elections, thus creating short-term stability. However, this success was temporary and highly dependent on the presence of international actors. In the long term, MINUSTAH has not been able to strengthen institutional capacity sustainably and has tended to increase dependence on external aid. Furthermore, various criticisms such as human rights violations, the cholera scandal, and a legitimacy crisis have also affected the intervention's effectiveness. This study concludes that international intervention was effective in initial stabilization but limited in creating independent and sustainable state-building.</i></p> <p>Abstrak</p> <p>Penelitian ini menganalisis efektivitas United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) dalam mengatasi krisis keamanan dan mendukung <i>state-building</i> di Haiti sebagai negara <i>fragile</i>. Dengan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, penelitian</p>

<p>Kata Kunci:</p> <p><i>United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH), Haiti, Krisis Keamanan, Organisasi Internasional, Intervensi Kemanusiaan</i></p> <p>DOI: 10.63280/jpsd.v2i1.48646</p>	<p>ini mengkaji tiga dimensi utama: stabilisasi keamanan, stabilitas politik, dan kapasitas institusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MINUSTAH berhasil menurunkan tingkat kekerasan dan mendukung penyelenggaraan pemilu, sehingga menciptakan stabilitas jangka pendek. Namun, keberhasilan tersebut bersifat temporer dan sangat bergantung pada kehadiran aktor internasional. Dalam jangka panjang, MINUSTAH belum mampu memperkuat kapasitas institusional secara berkelanjutan, bahkan cenderung memperkuat ketergantungan terhadap bantuan eksternal. Selain itu, berbagai kritik seperti pelanggaran HAM, skandal kolera, dan krisis legitimasi turut memengaruhi efektivitas intervensi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa intervensi internasional efektif dalam stabilisasi awal, tetapi terbatas dalam menciptakan <i>state-building</i> yang mandiri dan berkelanjutan.</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">Copyright © 2026 JPSD. All rights reserved.</p>
--	---

1. Pendahuluan

Haiti sering dikategorikan sebagai *fragile state*, yaitu negara dengan kapasitas institusi yang lemah, legitimasi politik yang rendah, serta ketidakmampuan dalam menyediakan keamanan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya (Chavalier, 2011). Dalam konteks ini, krisis keamanan di Haiti tidak hanya merupakan persoalan domestik, tetapi juga menjadi perhatian dalam studi hubungan internasional. Khususnya terkait peran intervensi internasional dan operasi penjaga perdamaian (*peacekeeping operations*) dalam proses *state-building* (Dupuy, 2007). Ketidakstabilan politik, lemahnya institusi keamanan, serta meningkatnya kekerasan oleh kelompok bersenjata menjadikan Haiti sebagai salah satu kasus penting dalam mengkaji efektivitas intervensi multilateral di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Hallward, 2004; Chavalier, 2011).

Sebagai respons terhadap memburuknya situasi keamanan dan politik di Haiti, Dewan Keamanan PBB membentuk United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) melalui Resolusi 1542 pada tahun 2004 (Ceide, 2008; Lara, 2020). Misi ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan jangka pendek, tetapi juga mendukung proses *state-building* melalui penguatan institusi politik, reformasi sektor keamanan, serta perlindungan hak asasi manusia (Heine & Thompson, 2011). Dalam kerangka hubungan internasional, MINUSTAH merepresentasikan bentuk intervensi kolektif yang menggabungkan dimensi keamanan, kemanusiaan, dan pembangunan (Khairani, 2014; Ceide, 2008; Lara, 2020).

Namun demikian, efektivitas operasi penjaga perdamaian seperti MINUSTAH masih menjadi perdebatan dalam literatur global (Ceide, 2008; Lara, 2020). Di satu sisi, pendekatan *peacekeeping* dianggap mampu menciptakan stabilitas sementara dan mencegah eskalasi konflik (Kretchik, 2007). Di sisi lain, sejumlah kajian kritis menunjukkan bahwa intervensi internasional berpotensi menciptakan ketergantungan (*dependency*), melemahkan kedaulatan negara, serta gagal menyelesaikan akar permasalahan struktural seperti kemiskinan dan lemahnya institusi negara (Hills, 2022). Perdebatan antara pendekatan stabilisasi (*stabilization*) dan kritik terhadap reproduksi ketergantungan ini menjadi salah satu isu sentral dalam studi intervensi internasional di negara-negara rapuh (Bellamy, 2008).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji peran MINUSTAH dari berbagai perspektif, seperti evaluasi stabilisasi keamanan, legitimasi politik intervensi, serta kritik terhadap dampak sosial dan pelanggaran yang terjadi selama operasi (Ceide, 2008; Khairani, 2014; Lara, 2020). Namun, sebagian besar studi tersebut cenderung membahas aspek-aspek tersebut secara terpisah dan belum secara komprehensif mengevaluasi efektivitas MINUSTAH dalam kerangka perdebatan antara keberhasilan stabilisasi dan potensi ketergantungan jangka panjang. Dengan demikian, terdapat *research gap* dalam memahami sejauh mana MINUSTAH benar-benar efektif dalam mengatasi krisis keamanan sekaligus berkontribusi pada pembangunan kapasitas negara Haiti secara berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan utama: sejauh mana MINUSTAH efektif dalam mengatasi krisis keamanan di Haiti? Pertanyaan ini penting untuk mengevaluasi tidak hanya capaian operasional misi penjaga perdamaian, tetapi juga implikasinya terhadap proses state-building di negara yang tergolong fragile state. Dengan menggunakan perspektif organisasi internasional dan konsep intervensi kemanusiaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian hubungan internasional, khususnya terkait efektivitas intervensi multilateral dalam menangani krisis keamanan di negara berkembang.

2. Kajian Pustaka

2.1 *United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH)*

United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) didirikan pada 1 Juni 2004 melalui resolusi Dewan Keamanan PBB 1542. Misi PBB ini menggantikan Pasukan Interim Multinasional (MIF) yang diotorisasi oleh Dewan Keamanan pada Februari 2004, setelah Presiden Bertrand Aristide meninggalkan Haiti untuk mengasingkan diri akibat konflik bersenjata yang meluas ke beberapa kota di

seluruh negeri. Komponen militer dari misi ini dipimpin oleh Angkatan Darat Brasil, dengan komandan pasukan yang juga merupakan warga negara Brasil.

MINUSTAH menarik keanggotaan dari berbagai negara berdaulat di bawah naungan PBB. Negara-negara anggota PBB memberikan personel militer, polisi, dan sipil untuk mendukung misi tersebut. Keanggotaan dalam MINUSTAH tidak terbatas pada negara tertentu tetapi terbuka untuk semua negara anggota PBB yang bersedia berkontribusi terhadap misi tersebut.

Tujuan utama MINUSTAH adalah menstabilkan Haiti setelah konflik bersenjata yang menyebabkan kekacauan politik dan sosial di negara tersebut. Misi ini bertujuan untuk memastikan keamanan, mendukung proses politik, memperkuat lembaga-lembaga pemerintah, dan mempromosikan serta melindungi hak asasi manusia di Haiti. Tujuan-tujuan ini adalah kepentingan bersama negara-negara anggota PBB yang terlibat, yaitu mencapai stabilitas dan perdamaian di Haiti.

MINUSTAH memiliki struktur formal yang dibentuk berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB 1542. Struktur ini mencakup komando dan pengendalian dari markas besar PBB di New York, serta komando di lapangan di Haiti. Misi ini dipimpin oleh seorang Kepala Misi Special Representative of the Secretary-General) yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal PBB. Kepala Misi ini dibantu oleh staf militer, polisi, dan sipil dari berbagai negara anggota.

2.2 Konsep Intervensi Kemanusiaan

Konsep intervensi kemanusiaan berakar pada pemikiran awal hukum internasional yang berkembang sejak abad ke-17. Salah satu tokoh penting dalam perkembangan gagasan ini adalah Hugo Grotius (1583–1645), yang sering disebut sebagai “bapak hukum internasional”. Grotius berupaya memperkenalkan standar moral dan politik dalam hubungan internasional, termasuk penghormatan terhadap kedaulatan negara dan kepatuhan terhadap perjanjian internasional. Dalam kerangka doktrin *just war* atau perang yang adil, Grotius berpendapat bahwa penggunaan kekuatan hanya dapat dibenarkan apabila didasarkan pada alasan hukum tertentu. Ia juga menyatakan bahwa rakyat memiliki hak untuk melakukan perlawanan terhadap tirani yang ekstrem, dan dalam kondisi tertentu, dukungan dari kekuatan asing terhadap rakyat yang tertindas dapat dianggap sah. Dengan demikian, gagasan awal intervensi kemanusiaan berkaitan erat dengan upaya melindungi masyarakat dari penindasan ketika otoritas negara gagal menjalankan tanggung jawabnya (Danish Institute of International Affairs, 1999).

Pemikiran Grotius kemudian memengaruhi perkembangan teori dan praktik intervensi kemanusiaan pada abad ke-19. Pada periode ini, meskipun prinsip non-intervensi mulai mendapatkan pengakuan yang lebih luas dalam hubungan internasional, banyak ahli hukum internasional masih mengakui legitimasi intervensi kemanusiaan dalam kondisi tertentu. Dalam praktiknya, sejumlah intervensi dilakukan oleh negara-negara besar Eropa dalam kerangka keseimbangan kekuatan dan *Concert of Europe*. Salah satu contoh yang sering dikemukakan adalah intervensi Inggris, Prancis, dan Rusia dalam Perang Kemerdekaan Yunani (1821–1829) untuk menghentikan kekerasan terhadap komunitas Kristen Yunani di bawah Kekaisaran Ottoman. Intervensi semacam ini menunjukkan bahwa alasan kemanusiaan kerap digunakan untuk membenarkan penggunaan kekuatan militer dalam upaya menghentikan kekejaman terhadap penduduk sipil (Kumaran & de Matos, 2023).

Namun demikian, konsep intervensi kemanusiaan juga menimbulkan perdebatan yang signifikan dalam hukum internasional modern. Di satu sisi, intervensi kemanusiaan dipandang sebagai bentuk solidaritas global untuk melindungi masyarakat dari kekerasan massal dan pelanggaran hak asasi manusia. Di sisi lain, konsep ini sering dikritik karena berpotensi melanggar prinsip dasar hubungan internasional, terutama kedaulatan negara dan prinsip non-interference yang berakar dari Perdamaian Westphalia tahun 1648. Selain itu, intervensi kemanusiaan juga diperdebatkan karena berpotensi bertentangan dengan prinsip larangan penggunaan kekuatan militer (*non-use of force*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 2(4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Oleh karena itu, perdebatan mengenai intervensi kemanusiaan tidak hanya berkaitan dengan aspek moral, tetapi juga menyangkut legitimasi hukum dan kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh negara-negara yang melakukan intervensi (Bellamy, 2008; Heraclides & Dialla, 2015).

Perdebatan mengenai intervensi kemanusiaan semakin menguat pada era pasca-Perang Dingin, khususnya pada tahun 1990-an, ketika terjadi berbagai krisis kemanusiaan berskala besar. Pada periode ini, sejumlah intervensi dilakukan dengan alasan kemanusiaan, seperti intervensi di Irak untuk melindungi komunitas Kurdi (1991), operasi internasional di Somalia (1992), Bosnia (1992–1995), Rwanda (1994), Haiti (1994), Kosovo (1999), dan Timor Timur (1999). Meskipun demikian, dalam kerangka hukum internasional modern, penggunaan kekuatan militer tetap diatur secara ketat oleh Piagam PBB melalui sistem keamanan kolektif yang menempatkan Dewan Keamanan sebagai aktor utama dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Berdasarkan Pasal 39 hingga Pasal 42 Piagam PBB, Dewan Keamanan memiliki kewenangan untuk menentukan adanya ancaman terhadap perdamaian serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan, baik

melalui sanksi non-militer maupun penggunaan kekuatan militer sebagai opsi terakhir. Kerangka ini menunjukkan upaya masyarakat internasional untuk menyeimbangkan antara perlindungan kemanusiaan dan penghormatan terhadap prinsip kedaulatan negara dalam penanganan krisis internasional.

2.3 Penelitian Terdahulu Terkait Peran MINUSTAH di Haiti

Penelitian mengenai United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) telah banyak dilakukan oleh para akademisi dengan fokus dan pendekatan yang beragam. Salah satu penelitian awal dilakukan oleh Ceïde (2004) yang menilai peran MINUSTAH dalam menciptakan stabilitas keamanan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta penegakan supremasi hukum di Haiti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MINUSTAH kerap dipersepsikan tidak memahami konteks sosial, sejarah, dan budaya lokal Haiti. Hal tersebut menyebabkan munculnya kesalahpahaman antara pasukan PBB dan masyarakat setempat, sehingga misi tersebut dianggap melindungi kepentingan elit politik dan pemerintah yang korup. Akibatnya, MINUSTAH kehilangan kredibilitas di mata masyarakat miskin Haiti dan dinilai kurang efektif dalam membangun perdamaian yang berkelanjutan.

Penelitian lain dilakukan oleh Khairani (2014) yang membahas peran MINUSTAH di Haiti, tetapi juga menyoroti aspek legalitas, justifikasi moral, serta proses politik di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNSC) yang melatarbelakangi pengerahan misi tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis pengaruh kepentingan politik negara-negara anggota UNSC dalam pembentukan dan pelaksanaan operasi penjaga perdamaian di Haiti. Dengan demikian, fokus penelitian ini lebih luas karena menekankan pada dinamika politik internasional dan proses pengambilan keputusan di tingkat global yang memengaruhi pelaksanaan misi MINUSTAH.

Selanjutnya, penelitian oleh Wijaya dan Hakim (2023) yang menawarkan perspektif kritis terhadap klaim keberhasilan MINUSTAH. Penelitian ini menggunakan pendekatan Michel Foucault untuk menganalisis hubungan antara pengetahuan, ideologi, dan kekuasaan dalam konstruksi narasi keberhasilan misi stabilisasi PBB di Haiti. Selain itu, penelitian oleh Karnanda (2019) yang menyoroti permasalahan pelanggaran yang terjadi selama operasi MINUSTAH, khususnya kasus pelecehan seksual yang melibatkan pasukan penjaga perdamaian. Penelitian tersebut menekankan pentingnya reformasi sektor keamanan, penguatan kontrol sipil, serta pembentukan mekanisme hukum dan pelatihan gender untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa kajian mengenai MINUSTAH telah mencakup berbagai aspek, mulai dari evaluasi efektivitas misi, proses politik internasional dalam pengerahan pasukan perdamaian, hingga kritik terhadap dampak sosial dan pelanggaran yang terjadi selama operasi berlangsung. Persamaan dari penelitian-penelitian tersebut terletak pada fokus kajian terhadap keterlibatan MINUSTAH dalam menangani krisis di Haiti. Namun, masing-masing penelitian memiliki fokus yang berbeda, seperti pada aspek legitimasi politik, kritik ideologis terhadap narasi keberhasilan misi, maupun isu spesifik seperti pelecehan seksual dalam operasi penjaga perdamaian.

Meskipun demikian, masih terdapat celah penelitian (*research gap*) yang dapat dikaji lebih lanjut. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung menyoroati aspek tertentu secara terpisah, seperti legitimasi politik pengerahan misi, kritik terhadap klaim keberhasilan PBB, atau permasalahan pelanggaran oleh pasukan penjaga perdamaian. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menganalisis secara lebih komprehensif mengenai peran dan tantangan MINUSTAH dalam mengatasi krisis keamanan di Haiti dengan menggunakan perspektif teori organisasi internasional dan konsep intervensi kemanusiaan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai efektivitas MINUSTAH sebagai aktor internasional, tetapi juga mengeksplorasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam upaya menciptakan stabilitas keamanan di Haiti sepanjang periode operasinya hingga berakhir pada tahun 2017.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan data diperoleh melalui studi pustaka. Data yang dikumpulkan melalui studi pustaka mencakup informasi dan pemahaman yang telah dikembangkan oleh peneliti sebelumnya dalam bidang studi yang relevan. Studi Pustaka melibatkan pencarian dan analisis literatur yang relevan dengan topik penelitian dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, dan laporan resmi yang dikeluarkan oleh MINUSTAH.

Penulis mengevaluasi dan menginterpretasikan data tersebut untuk mendapatkan wawasan yang diperlukan dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Selain itu, penulis akan melakukan analisis terhadap data kualitatif dan melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan hubungan dan pola yang terdapat pada data. Secara spesifik, penulis terlebih dahulu akan mengumpulkan data-data terkait keputusan MINUSTAH di Haiti.

Kemudian, penulis akan menelusuri dengan menggunakan analisis dan identifikasi dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh MINUSTAH dalam membentuk kebijakan keamanan di negara tersebut untuk menarik kesimpulan sekaligus menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.

Data dalam studi ini dianalisis dengan menggunakan metode Miles & Huberman (1984) dengan proses analisis data dengan prosedur berikut: (1) mereduksi data, (2) menyajikan data, dan (3) menarik Kesimpulan atau melakukan verifikasi. Mereka menegaskan bahwa ketiga elemen tersebut sangat penting dalam analisis data kualitatif karena keterkaitan di antara mereka harus terus dievaluasi untuk menentukan arah dan isi dari kesimpulan akhir dari penelitian.

Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan analisis terhadap data kualitatif dan melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan hubungan dan pola yang terdapat pada data. Secara spesifik, penulis terlebih dahulu akan mengumpulkan data-data terkait keputusan MINUSTAH di Haiti. Kemudian, penulis akan menelusuri dengan menggunakan analisis dan identifikasi dokumendokumen yang dikeluarkan oleh MINUSTAH dalam membentuk kebijakan keamanan di negara tersebut untuk menarik kesimpulan sekaligus menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.

Data dalam studi ini dianalisis dengan menggunakan metode Miles & Huberman (1984) dengan proses analisis data dengan prosedur berikut: (1) mereduksi data, (2) menyajikan data, dan (3) menarik Kesimpulan atau melakukan verifikasi. Mereka menegaskan bahwa ketiga elemen tersebut sangat penting dalam analisis data kualitatif karena keterkaitan di antara mereka harus terus dievaluasi untuk menentukan arah dan isi dari kesimpulan akhir dari penelitian.

Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan analisis terhadap data kualitatif dan melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan hubungan dan pola yang terdapat pada data. Secara spesifik, penulis terlebih dahulu akan mengumpulkan data-data terkait keputusan MINUSTAH di Haiti. Kemudian, penulis akan menelusuri dengan menggunakan analisis dan identifikasi dokumendokumen yang dikeluarkan oleh MINUSTAH dalam membentuk kebijakan keamanan di negara tersebut untuk menarik kesimpulan sekaligus menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 *Security Stabilization: Evaluasi Penurunan Kekerasan dan Peran MINUSTAH*

Salah satu mandat utama United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) adalah menciptakan stabilitas keamanan sebagai fondasi bagi proses politik dan pembangunan negara. Dalam konteks Haiti sebagai fragile state, stabilisasi keamanan menjadi indikator kunci dalam menilai efektivitas intervensi internasional. Negara dengan kapasitas institusional yang lemah seperti Haiti sering kali tidak mampu mengendalikan kekerasan domestik, sehingga membuka ruang bagi keterlibatan aktor eksternal, termasuk operasi penjaga perdamaian PBB (Archer, 2001). Oleh karena itu, pertanyaan utama dalam bagian ini adalah sejauh mana MINUSTAH berhasil menurunkan tingkat kekerasan, serta bagaimana peran pasukan PBB dalam proses tersebut.

Secara empiris, terdapat bukti bahwa kehadiran MINUSTAH berkontribusi terhadap penurunan tingkat kekerasan, khususnya pada periode awal hingga pertengahan operasinya. Setelah pembentukan MINUSTAH pada tahun 2004 melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 1542, situasi keamanan di Haiti yang sebelumnya ditandai oleh konflik bersenjata, aktivitas geng, dan lemahnya kontrol negara mulai menunjukkan perbaikan bertahap (United Nations Security Council, 2004). Operasi keamanan yang dilakukan oleh pasukan MINUSTAH, terutama di wilayah perkotaan seperti Port-au-Prince, memainkan peran penting dalam mengurangi aktivitas kelompok bersenjata. Dalam laporan Sekretaris Jenderal PBB, disebutkan bahwa peningkatan patroli keamanan, operasi gabungan dengan Kepolisian Nasional Haiti (HNP), serta penguatan kapasitas intelijen berkontribusi pada penurunan kasus penculikan dan kekerasan kriminal pada akhir 2000-an (Security Council, 2008).

Lebih lanjut, keberhasilan relatif dalam menekan kekerasan juga terlihat dari operasi yang dilakukan di kawasan rawan seperti Cité Soleil, yang sebelumnya dikenal sebagai pusat aktivitas geng bersenjata. Operasi militer yang dilakukan oleh MINUSTAH mampu memulihkan kontrol teritorial negara di wilayah tersebut dan mengurangi dominasi kelompok bersenjata non-negara. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan kekuatan yang terukur dalam kerangka mandat Bab VII Piagam PBB dapat menjadi instrumen efektif dalam menciptakan stabilitas jangka pendek di negara yang mengalami krisis keamanan serius (Heine & Thompson, 2011).

Peran MINUSTAH dalam stabilisasi keamanan tidak hanya terbatas pada operasi militer, tetapi juga mencakup dimensi kelembagaan. Dalam perspektif organisasi internasional, MINUSTAH berfungsi sebagai instrumen kolektif yang digunakan oleh komunitas internasional untuk memperkuat kapasitas negara tuan rumah (Archer, 2001). Salah satu fokus utama misi ini adalah reformasi sektor keamanan, khususnya melalui penguatan Haitian National Police (HNP). MINUSTAH memberikan pelatihan, pendampingan, serta dukungan logistik untuk meningkatkan profesionalisme dan kapasitas operasional aparat kepolisian lokal. Upaya ini sejalan dengan tujuan jangka panjang *state-building*, yaitu menciptakan institusi domestik yang mampu menjaga stabilitas keamanan secara mandiri (United Nations Security Council, 2004).

Selain itu, MINUSTAH juga berperan sebagai arena kolaborasi internasional, di mana berbagai negara anggota PBB berkontribusi dalam upaya stabilisasi Haiti. Kontribusi signifikan dari negara-negara Amerika Latin, seperti Brasil dan Chili, menunjukkan adanya dimensi regional dalam operasi ini (Diamint, 2007). Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat kapasitas operasional misi, tetapi juga meningkatkan legitimasi intervensi internasional di mata komunitas global.

Namun demikian, meskipun terdapat indikasi penurunan kekerasan, efektivitas stabilisasi keamanan yang dicapai oleh MINUSTAH bersifat terbatas dan tidak sepenuhnya berkelanjutan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penurunan tingkat kekerasan lebih banyak disebabkan oleh kehadiran langsung pasukan internasional daripada transformasi struktural dalam sistem keamanan domestik Haiti (Heine & Thompson, 2011). Dengan kata lain, stabilitas yang tercapai cenderung bersifat sementara dan rentan terhadap kemunduran setelah pengurangan atau penarikan pasukan internasional.

Hal ini diperkuat oleh data yang menunjukkan bahwa setelah pengasingan Presiden Jean-Bertrand Aristide pada tahun 2004, kekerasan tetap berlangsung dalam skala signifikan. Kolbe dan Hutson (2006) menemukan bahwa sekitar 8.000 orang terbunuh di wilayah metropolitan Port-au-Prince dalam kurun waktu kurang dari dua tahun setelah krisis tersebut, dengan sebagian pelaku berasal dari aktor negara maupun kelompok bersenjata. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun MINUSTAH hadir sebagai kekuatan stabilisasi, dinamika kekerasan di Haiti tetap kompleks dan tidak sepenuhnya dapat dikendalikan melalui intervensi eksternal.

Selain itu, keberhasilan stabilisasi keamanan juga menghadapi tantangan dari faktor struktural yang tidak terselesaikan. Kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial, serta lemahnya legitimasi politik tetap menjadi akar permasalahan yang mendorong munculnya kekerasan. Dalam konteks ini, pendekatan keamanan yang berfokus pada operasi militer cenderung

menghasilkan apa yang disebut sebagai *negative peace*, yaitu kondisi tanpa kekerasan langsung, tetapi tanpa penyelesaian terhadap penyebab konflik yang mendasar (Galtung dalam konteks studi perdamaian, meskipun tidak disebut langsung dalam referensi, dapat dihubungkan secara konseptual). Dengan demikian, stabilisasi yang dicapai oleh MINUSTAH tidak sepenuhnya berkontribusi pada pembangunan perdamaian yang berkelanjutan.

Selain keterbatasan dalam aspek struktural, legitimasi MINUSTAH sebagai aktor keamanan juga menghadapi tantangan serius. Kasus-kasus pelanggaran yang melibatkan pasukan penjaga perdamaian, seperti eksploitasi seksual dan penyebaran kolera, telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap misi tersebut (Barros, 2020; The Transnational Development Clinic, 2013). Penurunan legitimasi ini secara tidak langsung memengaruhi efektivitas operasi keamanan, karena keberhasilan stabilisasi sangat bergantung pada dukungan dan kepercayaan masyarakat lokal.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa MINUSTAH memiliki kontribusi signifikan dalam menurunkan tingkat kekerasan di Haiti, terutama melalui operasi keamanan dan dukungan terhadap aparat lokal. Namun, keberhasilan ini bersifat parsial dan temporer, serta sangat bergantung pada kehadiran pasukan internasional. Ketidakmampuan untuk mengatasi akar permasalahan struktural, seperti kemiskinan dan lemahnya institusi negara, menunjukkan bahwa stabilisasi keamanan yang dicapai belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan *state-building*.

Temuan ini memperkuat perdebatan dalam studi hubungan internasional mengenai efektivitas operasi penjaga perdamaian di negara-negara fragile. Di satu sisi, intervensi seperti MINUSTAH mampu menciptakan stabilitas jangka pendek dan mencegah eskalasi konflik. Di sisi lain, intervensi tersebut berisiko menciptakan ketergantungan dan gagal menghasilkan transformasi struktural yang diperlukan untuk perdamaian jangka panjang. Oleh karena itu, evaluasi terhadap MINUSTAH tidak hanya perlu mempertimbangkan penurunan kekerasan sebagai indikator keberhasilan, tetapi juga sejauh mana misi tersebut berkontribusi pada pembangunan kapasitas negara yang berkelanjutan.

4.2 *Political Stability: Peran MINUSTAH dalam Mendukung Proses Demokrasi di Haiti*

Selain stabilisasi keamanan, mandat utama MINUSTAH juga mencakup dukungan terhadap proses politik dan pembangunan demokrasi di Haiti. Dalam konteks negara fragile, stabilitas politik tidak hanya diukur dari absennya konflik, tetapi juga dari keberadaan institusi demokratis yang berfungsi, legitimasi pemerintahan, serta proses politik yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, bagian ini akan mengulas sejauh mana misi ini berhasil mendukung proses demokrasi di Haiti.

Secara normatif, MINUSTAH dirancang untuk memainkan peran penting dalam memperkuat tata kelola demokratis melalui dukungan terhadap pemilu, reformasi institusi politik, serta penguatan supremasi hukum. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1542 secara eksplisit menugaskan MINUSTAH untuk membantu pemerintah transisi Haiti dalam menyelenggarakan proses politik yang kredibel dan demokratis (United Nations Security Council, 2004). Dalam hal ini, MINUSTAH tidak hanya berfungsi sebagai aktor keamanan, tetapi juga sebagai fasilitator proses politik yang bertujuan membangun legitimasi pemerintahan pasca-konflik.

Salah satu kontribusi paling nyata MINUSTAH dalam bidang politik adalah dukungannya terhadap penyelenggaraan pemilu. Misi ini memainkan peran penting dalam memfasilitasi pemilu presiden dan legislatif pada tahun 2006, yang menghasilkan terpilihnya René Préval sebagai presiden. Pemilu ini sering dianggap sebagai langkah maju dalam proses demokratisasi Haiti karena relatif lebih stabil dibandingkan periode sebelumnya yang ditandai oleh konflik politik dan kekerasan (Heine & Thompson, 2011). MINUSTAH memberikan dukungan logistik, keamanan, serta bantuan teknis dalam penyelenggaraan pemilu, yang memungkinkan proses tersebut berlangsung dengan tingkat partisipasi yang cukup signifikan.

Selain pemilu 2006, MINUSTAH juga terlibat dalam mendukung pemilu-pemilu berikutnya, termasuk pemilu 2010-2011 yang berlangsung dalam situasi yang sangat kompleks pasca gempa bumi 2010. Dalam kondisi di mana infrastruktur negara hancur dan kapasitas administratif sangat terbatas, peran MINUSTAH menjadi krusial dalam memastikan keberlangsungan proses politik. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi internasional dapat berfungsi sebagai external stabilizer dalam menjaga kontinuitas proses demokrasi di negara yang mengalami krisis multidimensi.

Namun demikian, meskipun MINUSTAH berhasil memfasilitasi penyelenggaraan pemilu, efektivitasnya dalam membangun demokrasi yang substantif masih dipertanyakan. Sejumlah studi menunjukkan bahwa proses demokratisasi di Haiti tetap menghadapi berbagai tantangan struktural, seperti lemahnya institusi negara, rendahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta maraknya praktik korupsi dan patronase politik (Thomas, 2017). Dalam konteks ini, pemilu yang diselenggarakan dengan dukungan internasional belum tentu menghasilkan demokrasi yang berkualitas jika tidak diiringi dengan penguatan institusi politik secara menyeluruh.

Lebih lanjut, kritik terhadap peran MINUSTAH dalam proses demokrasi juga muncul terkait dengan isu legitimasi. Keterlibatan aktor internasional dalam proses politik domestik sering kali dipandang sebagai bentuk intervensi yang dapat mengurangi kedaulatan negara. Dalam kasus Haiti, beberapa pihak berpendapat bahwa proses politik yang didukung oleh MINUSTAH cenderung mencerminkan kepentingan komunitas internasional daripada aspirasi masyarakat lokal (Dupuy, 2007). Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana demokrasi yang dibangun melalui intervensi eksternal dapat benar-benar dianggap sebagai representasi kehendak rakyat.

Selain itu, dinamika politik Haiti yang kompleks juga membatasi dampak positif dari intervensi MINUSTAH. Seperti yang dijelaskan dalam konteks historis dan politik Haiti, negara ini memiliki tradisi panjang ketidakstabilan politik, termasuk kudeta, konflik elite, serta lemahnya legitimasi institusi negara (Dalalana Corbellini, 2009). Kondisi ini membuat upaya demokratisasi menjadi sangat sulit, bahkan dengan dukungan internasional yang signifikan. Dengan kata lain, MINUSTAH beroperasi dalam lingkungan yang sangat tidak kondusif bagi konsolidasi demokrasi.

Masalah lain yang menghambat efektivitas MINUSTAH dalam mendukung stabilitas politik adalah ketergantungan terhadap bantuan eksternal. Seperti yang ditunjukkan oleh International Crisis Group (2010), pada tahun 2010 sekitar 70% anggaran nasional Haiti bergantung pada bantuan internasional. Ketergantungan ini tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga pada proses politik, di mana pemerintah Haiti menjadi sangat bergantung pada dukungan eksternal untuk menjalankan fungsi-fungsi dasarnya. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan otonomi politik dan menghambat perkembangan institusi demokratis yang mandiri.

Selain itu, berbagai krisis politik yang terus terjadi setelah periode MINUSTAH, termasuk pembunuhan Presiden Jovenel Moïse pada tahun 2021 (Le

Monde, 2021), menunjukkan bahwa stabilitas politik di Haiti masih sangat rapuh. Fakta ini memperkuat argumen bahwa intervensi MINUSTAH belum berhasil menciptakan fondasi demokrasi yang kuat dan berkelanjutan.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa MINUSTAH memainkan peran penting dalam mendukung proses demokrasi di Haiti, terutama melalui fasilitasi pemilu dan stabilisasi politik jangka pendek. Namun, kontribusi tersebut belum cukup untuk menghasilkan demokrasi yang substantif dan berkelanjutan. Keterbatasan ini disebabkan oleh kombinasi faktor internal, seperti lemahnya institusi negara dan kompleksitas politik domestik, serta faktor eksternal, seperti ketergantungan pada bantuan internasional dan isu legitimasi intervensi.

Temuan ini kembali menegaskan perdebatan dalam studi hubungan internasional mengenai efektivitas intervensi internasional dalam proses state-building dan demokratisasi. Di satu sisi, intervensi seperti MINUSTAH dapat membantu menciptakan kondisi awal yang diperlukan untuk demokrasi. Di sisi lain, tanpa transformasi struktural yang mendalam, intervensi tersebut berisiko hanya menghasilkan stabilitas semu dan demokrasi yang dangkal. Oleh karena itu, evaluasi terhadap MINUSTAH perlu mempertimbangkan tidak hanya keberhasilan prosedural, tetapi juga dampaknya terhadap kualitas dan keberlanjutan demokrasi di Haiti.

4.3 *Institutional Capacity: Penguatan Negara atau Reproduksi Ketergantungan?*

Selain stabilisasi keamanan dan dukungan terhadap proses politik, salah satu tujuan utama intervensi MINUSTAH adalah memperkuat kapasitas institusional negara Haiti. Dalam kerangka state-building, keberhasilan intervensi internasional tidak hanya diukur dari terciptanya stabilitas jangka pendek, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu mengembangkan kapasitas untuk menjalankan fungsi-fungsi dasarnya secara mandiri, termasuk dalam bidang keamanan, pemerintahan, dan pelayanan publik. Oleh karena itu, pertanyaan kunci dalam bagian ini adalah apakah kehadiran MINUSTAH berhasil memperkuat kapasitas negara Haiti, atau justru memperdalam ketergantungan terhadap aktor eksternal.

Secara normatif, mandat MINUSTAH mencakup upaya untuk membangun kembali institusi negara Haiti yang lemah, termasuk reformasi sektor keamanan, penguatan tata kelola pemerintahan, serta dukungan terhadap supremasi hukum (United Nations Security Council, 2004). Dalam konteks ini, MINUSTAH berperan

sebagai katalisator state-building, dengan menyediakan sumber daya, keahlian, dan dukungan teknis yang diperlukan untuk memperbaiki kapasitas institusional negara. Salah satu fokus utama adalah reformasi Haitian National Police (HNP), yang sebelumnya ditandai oleh korupsi, kurangnya profesionalisme, dan keterbatasan kapasitas operasional (Dalalana Corbellini, 2009).

Melalui program pelatihan, pendampingan, dan penyediaan sumber daya, MINUSTAH berupaya meningkatkan kapasitas HNP agar mampu menjalankan fungsi keamanan secara efektif. Upaya ini menunjukkan adanya kemajuan dalam aspek tertentu, seperti peningkatan jumlah personel kepolisian dan perbaikan standar operasional. Selain itu, MINUSTAH juga terlibat dalam program Disarmament, Demobilization, and Reintegration (DDR), yang bertujuan untuk mengurangi jumlah aktor bersenjata non-negara dan mendukung reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Program-program ini mencerminkan pendekatan komprehensif dalam membangun kapasitas negara di sektor keamanan.

Namun demikian, meskipun terdapat kemajuan dalam aspek teknis, efektivitas jangka panjang dari upaya penguatan institusi ini masih dipertanyakan. Salah satu masalah utama adalah bahwa peningkatan kapasitas sering kali bersifat superfisial dan tidak diiringi oleh perubahan struktural yang mendalam. Seperti yang dijelaskan oleh Thomas (2017), intervensi internasional di Haiti cenderung berfokus pada solusi jangka pendek tanpa mengatasi akar permasalahan yang mendasari lemahnya institusi negara, seperti korupsi, ketimpangan sosial, dan lemahnya legitimasi politik.

Lebih lanjut, ketergantungan terhadap bantuan internasional menjadi salah satu konsekuensi paling signifikan dari intervensi MINUSTAH. Seperti yang dicatat dalam berbagai studi, termasuk laporan International Crisis Group (2010), sebagian besar anggaran negara Haiti bergantung pada bantuan eksternal, terutama setelah gempa bumi 2010, di mana sekitar 70% anggaran nasional dibiayai oleh aktor internasional. Ketergantungan ini mencerminkan lemahnya kapasitas fiskal negara dan menunjukkan bahwa pemerintah Haiti belum mampu menjalankan fungsi dasarnya tanpa dukungan eksternal.

Fenomena ketergantungan ini juga diperkuat oleh peran dominan organisasi internasional dan NGO dalam penyediaan layanan publik. Seperti yang dijelaskan oleh Vokral (2016), lemahnya institusi negara menyebabkan banyak fungsi pemerintahan, seperti kesehatan, pendidikan, dan bantuan kemanusiaan, diambil alih oleh aktor non-negara. Kondisi ini menciptakan apa yang disebut sebagai "substitusi negara", di mana peran pemerintah digantikan oleh organisasi eksternal. Meskipun hal ini dapat memberikan solusi jangka pendek bagi

kebutuhan masyarakat, dalam jangka panjang hal ini justru melemahkan kapasitas negara dan mengurangi akuntabilitas pemerintah terhadap warganya.

Selain itu, intervensi internasional juga berpotensi menciptakan apa yang disebut sebagai “de-responsibilization” negara, yaitu kondisi di mana pemerintah domestik menjadi kurang bertanggung jawab karena adanya aktor eksternal yang mengambil alih fungsi-fungsi penting (Thomas, 2017). Dalam konteks Haiti, keberadaan MINUSTAH dan berbagai organisasi internasional lainnya dapat mengurangi insentif bagi pemerintah untuk melakukan reformasi internal dan membangun kapasitas institusional secara mandiri.

Masalah lain yang menghambat penguatan kapasitas institusional adalah kurangnya koordinasi antara berbagai aktor internasional. Seperti yang dibahas dalam literatur, pendekatan cluster yang digunakan oleh PBB dalam koordinasi bantuan sering kali tidak efektif dalam konteks Haiti, karena kurangnya integrasi dengan kebutuhan lokal dan lemahnya koordinasi antar lembaga (Giblet, 2022). Hal ini menyebabkan fragmentasi dalam implementasi program dan mengurangi efektivitas upaya state-building.

Selain itu, intervensi internasional juga berpotensi menciptakan apa yang disebut sebagai “de-responsibilization” negara, yaitu kondisi di mana pemerintah domestik menjadi kurang bertanggung jawab karena adanya aktor eksternal yang mengambil alih fungsi-fungsi penting (Thomas, 2017). Dalam konteks Haiti, keberadaan MINUSTAH dan berbagai organisasi internasional lainnya dapat mengurangi insentif bagi pemerintah untuk melakukan reformasi internal dan membangun kapasitas institusional secara mandiri.

Masalah lain yang menghambat penguatan kapasitas institusional adalah kurangnya koordinasi antara berbagai aktor internasional. Seperti yang dibahas dalam literatur, pendekatan cluster yang digunakan oleh PBB dalam koordinasi bantuan sering kali tidak efektif dalam konteks Haiti, karena kurangnya integrasi dengan kebutuhan lokal dan lemahnya koordinasi antar lembaga (Giblet, 2022). Hal ini menyebabkan fragmentasi dalam implementasi program dan mengurangi efektivitas upaya state-building.

Selain itu, legitimasi institusi negara juga menjadi tantangan utama dalam proses penguatan kapasitas. Dalam konteks negara fragile, legitimasi politik merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan institusi dalam menjalankan fungsinya. Namun, di Haiti, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap rendah, sebagian karena sejarah panjang korupsi dan ketidakstabilan politik (Dalalana Corbellini, 2009). Intervensi internasional yang terlalu dominan juga dapat memperburuk masalah ini, karena pemerintah

dianggap sebagai aktor yang bergantung pada dukungan eksternal, bukan sebagai representasi kehendak rakyat.

Di sisi lain, tidak dapat disangkal bahwa MINUSTAH juga memberikan kontribusi positif dalam menciptakan kerangka institusional yang lebih stabil dibandingkan periode sebelum intervensi. Dengan mendukung reformasi sektor keamanan, memperkuat proses politik, serta menyediakan bantuan teknis, MINUSTAH membantu membangun fondasi awal bagi penguatan negara. Namun, kontribusi ini cenderung terbatas pada aspek formal dan belum sepenuhnya berhasil menciptakan institusi yang efektif dan berkelanjutan.

Keterbatasan ini menjadi semakin jelas ketika melihat kondisi Haiti pasca-penarikan MINUSTAH. Meningkatnya kembali kekerasan, lemahnya kontrol negara terhadap wilayah tertentu, serta berlanjutnya krisis politik menunjukkan bahwa kapasitas institusional yang dibangun selama periode intervensi belum cukup kuat untuk bertahan tanpa dukungan eksternal (Ceide, 2008). Hal ini mengindikasikan bahwa proses *state-building* yang dilakukan oleh MINUSTAH belum berhasil mencapai tujuannya secara penuh.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa intervensi MINUSTAH menghasilkan dampak yang ambivalen terhadap kapasitas institusional negara Haiti. Di satu sisi, terdapat peningkatan kapasitas dalam aspek tertentu, terutama di sektor keamanan dan administrasi publik. Di sisi lain, intervensi tersebut juga memperkuat ketergantungan terhadap bantuan internasional dan gagal mengatasi akar permasalahan struktural yang menyebabkan lemahnya institusi negara.

Temuan ini memperkuat argumen dalam literatur hubungan internasional bahwa intervensi internasional di negara *fragile* sering kali menghadapi dilema antara stabilisasi jangka pendek dan pembangunan kapasitas jangka panjang. Dalam kasus Haiti, MINUSTAH berhasil menciptakan stabilitas sementara dan memberikan dukungan teknis bagi institusi negara. Namun, tanpa transformasi struktural yang mendalam, upaya tersebut tidak cukup untuk menghasilkan negara yang kuat dan mandiri.

Oleh karena itu, evaluasi terhadap MINUSTAH menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam aspek tertentu, Haiti tetap berada dalam kondisi ketergantungan terhadap aktor eksternal. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai efektivitas model intervensi internasional yang berfokus pada stabilisasi tanpa diiringi oleh strategi yang komprehensif untuk membangun kapasitas negara secara berkelanjutan.

4.4 *Kritik terhadap MINUSTAH: Pelanggaran HAM, Kasus Kolera, dan Krisis Legitimasi Intervensi*

Meskipun MINUSTAH dirancang sebagai instrumen stabilisasi dan state-building, berbagai kritik serius muncul terkait dampak negatif dari intervensi tersebut, khususnya dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia (HAM), skandal kolera, serta krisis legitimasi yang dihasilkan. Kritik-kritik ini menjadi penting karena tidak hanya memengaruhi persepsi masyarakat lokal terhadap misi PBB, tetapi juga mempertanyakan efektivitas dan moralitas intervensi internasional dalam konteks negara fragile seperti Haiti.

Salah satu kritik utama terhadap MINUSTAH berkaitan dengan keterlibatan personelnnya dalam pelanggaran HAM, khususnya kasus eksploitasi dan kekerasan seksual. Dalam literatur yang dianalisis, kasus-kasus ini bukanlah insiden terisolasi, melainkan bagian dari pola yang lebih luas dalam operasi penjaga perdamaian PBB. Giblet (2022) menunjukkan bahwa berbagai laporan mengungkap keterlibatan personel MINUSTAH dalam tindakan eksploitasi seksual terhadap perempuan dan anak-anak Haiti, yang sering kali terjadi dalam konteks ketimpangan kekuasaan dan kerentanan ekonomi masyarakat lokal. Kondisi kemiskinan ekstrem membuat sebagian korban berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap eksploitasi, termasuk praktik transactional sex antara warga sipil dan pasukan penjaga perdamaian.

Lebih lanjut, laporan dari organisasi internasional seperti Human Rights Watch dan berbagai studi akademik menyoroti lemahnya mekanisme akuntabilitas dalam menangani kasus-kasus tersebut. Personel penjaga perdamaian yang terlibat sering kali tidak diadili di Haiti, melainkan dikembalikan ke negara asal mereka tanpa proses hukum yang transparan (Giblet, 2022). Hal ini menciptakan kesan impunitas dan memperburuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap misi PBB. Dalam konteks ini, kehadiran MINUSTAH yang seharusnya melindungi masyarakat justru menjadi sumber ancaman bagi sebagian kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak-anak.

Lebih lanjut, laporan dari organisasi internasional seperti Human Rights Watch dan berbagai studi akademik menyoroti lemahnya mekanisme akuntabilitas dalam menangani kasus-kasus tersebut. Personel penjaga perdamaian yang terlibat sering kali tidak diadili di Haiti, melainkan dikembalikan ke negara asal mereka tanpa proses hukum yang transparan (Giblet, 2022). Hal ini menciptakan kesan impunitas dan memperburuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap misi PBB. Dalam konteks ini, kehadiran MINUSTAH yang seharusnya melindungi

masyarakat justru menjadi sumber ancaman bagi sebagian kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak-anak.

Selain pelanggaran seksual, kritik terhadap MINUSTAH juga mencakup penggunaan kekuatan yang berlebihan dalam operasi keamanan. Beberapa operasi militer di kawasan padat penduduk seperti Cité Soleil dilaporkan menyebabkan korban sipil, yang menimbulkan pertanyaan mengenai proporsionalitas dan kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional. Meskipun tujuan operasi tersebut adalah untuk menekan kelompok bersenjata, dampaknya terhadap masyarakat sipil menunjukkan adanya trade-off antara stabilisasi keamanan dan perlindungan HAM.

Namun, salah satu skandal terbesar yang secara signifikan merusak legitimasi MINUSTAH adalah kasus penyebaran kolera pada tahun 2010. Epideminya dianggap sebagai salah satu contoh paling jelas dari dampak negatif intervensi internasional di Haiti. Berdasarkan berbagai penelitian dan laporan, wabah kolera yang menewaskan lebih dari 10.000 orang dan menginfeksi ratusan ribu lainnya berasal dari kontingen pasukan penjaga perdamaian asal Nepal yang ditempatkan di Haiti (Giblet, 2022). Limbah dari kamp pasukan tersebut dilaporkan mencemari sungai Artibonite, yang menjadi sumber air utama bagi banyak masyarakat.

Kasus ini tidak hanya menunjukkan kegagalan dalam standar kesehatan dan sanitasi, tetapi juga mencerminkan lemahnya akuntabilitas institusi internasional. Selama bertahun-tahun, PBB menolak untuk mengakui tanggung jawabnya atas wabah tersebut, meskipun terdapat bukti ilmiah yang kuat yang mengaitkan sumber epidemi dengan kehadiran pasukan MINUSTAH. Penolakan ini menimbulkan kritik luas dari berbagai pihak, termasuk organisasi HAM dan komunitas akademik, yang menilai bahwa PBB gagal memenuhi prinsip dasar tanggung jawab dan transparansi (Giblet, 2022).

Dari perspektif hubungan internasional, kasus kolera ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap legitimasi intervensi internasional. Legitimasi merupakan elemen kunci dalam keberhasilan operasi penjaga perdamaian, karena dukungan masyarakat lokal sangat menentukan efektivitas implementasi mandat. Namun, dalam kasus Haiti, skandal kolera justru memperburuk persepsi masyarakat terhadap MINUSTAH dan PBB secara keseluruhan. Alih-alih dipandang sebagai aktor yang membantu, PBB dianggap sebagai pihak yang memperparah penderitaan masyarakat.

Lebih jauh lagi, kritik terhadap MINUSTAH juga berkaitan dengan pertanyaan yang lebih luas mengenai legitimasi intervensi internasional dalam konteks state-building. Seperti yang dijelaskan oleh Thomas (2017), intervensi

internasional di Haiti sering kali dianggap sebagai bentuk “imposisi eksternal” yang tidak sepenuhnya mempertimbangkan konteks lokal dan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, MINUSTAH dapat dilihat sebagai representasi dari pendekatan top-down dalam pembangunan negara, di mana kebijakan dan program dirancang oleh aktor internasional tanpa partisipasi yang memadai dari masyarakat lokal.

Selain itu, keberadaan MINUSTAH dalam jangka waktu yang panjang juga menimbulkan pertanyaan mengenai kedaulatan negara. Meskipun intervensi dilakukan dengan mandat Dewan Keamanan PBB, dominasi aktor internasional dalam berbagai aspek pemerintahan Haiti dapat dianggap sebagai bentuk pengurangan kedaulatan. Hal ini sejalan dengan argumen bahwa intervensi internasional sering kali menciptakan ketergantungan struktural, di mana negara penerima bantuan menjadi tidak mampu berfungsi secara mandiri (Vokral, 2016; Thomas, 2017).

Krisis legitimasi ini juga diperparah oleh kurangnya koordinasi dan efektivitas dalam pelaksanaan program bantuan internasional. Seperti yang dibahas oleh Giblet (2022), pendekatan cluster yang digunakan oleh PBB sering kali tidak mampu mengakomodasi kompleksitas konteks lokal Haiti. Fragmentasi antar aktor internasional, serta kurangnya integrasi dengan institusi lokal, mengurangi efektivitas intervensi dan memperkuat persepsi bahwa bantuan internasional lebih menguntungkan aktor eksternal daripada masyarakat lokal.

Di sisi lain, penting untuk dicatat bahwa tidak semua kritik terhadap MINUSTAH bersifat absolut. Beberapa studi mengakui bahwa misi ini memberikan kontribusi dalam stabilisasi keamanan dan dukungan terhadap proses politik, seperti yang telah dibahas pada bagian sebelumnya. Namun, keberhasilan tersebut tidak dapat menghapus dampak negatif yang ditimbulkan, terutama dalam hal pelanggaran HAM dan skandal kolera.

Dengan demikian, evaluasi terhadap MINUSTAH menunjukkan adanya kontradiksi mendasar antara tujuan normatif intervensi dan realitas implementasinya. Di satu sisi, MINUSTAH bertujuan untuk melindungi masyarakat, membangun perdamaian, dan memperkuat negara. Di sisi lain, praktik di lapangan menunjukkan adanya pelanggaran HAM, kegagalan akuntabilitas, serta dampak negatif yang signifikan terhadap masyarakat lokal.

Kesimpulannya, kritik terhadap MINUSTAH menyoroti keterbatasan dan risiko dari intervensi internasional dalam konteks negara fragile. Pelanggaran HAM oleh personel penjaga perdamaian, penyebaran kolera, serta krisis legitimasi yang dihasilkan menunjukkan bahwa intervensi internasional tidak selalu menghasilkan dampak positif, dan dalam beberapa kasus justru dapat

memperburuk kondisi yang ada. Oleh karena itu, penting bagi komunitas internasional untuk mengevaluasi kembali pendekatan yang digunakan dalam operasi penjaga perdamaian, dengan menekankan pada akuntabilitas, partisipasi lokal, serta pemahaman yang lebih mendalam terhadap konteks sosial dan politik negara tuan rumah.

5. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) dalam mengatasi krisis keamanan serta mendukung proses state-building di Haiti sebagai negara fragile. Berdasarkan analisis terhadap tiga dimensi utama—security stabilization, political stability, dan institutional capacity—serta kritik terhadap implementasi misi, penelitian ini menemukan bahwa MINUSTAH menghasilkan dampak yang bersifat ambivalen: berhasil dalam menciptakan stabilitas jangka pendek, namun terbatas dalam menghasilkan perubahan struktural yang berkelanjutan.

Dalam aspek stabilisasi keamanan, MINUSTAH terbukti berkontribusi terhadap penurunan tingkat kekerasan, khususnya melalui operasi militer dan kerja sama dengan Haitian National Police (HNP). Namun, keberhasilan ini cenderung bersifat temporer dan sangat bergantung pada kehadiran pasukan internasional. Ketika kehadiran tersebut berkurang, kekerasan kembali meningkat, menunjukkan bahwa kapasitas keamanan domestik belum sepenuhnya terbentuk.

Dalam dimensi stabilitas politik, MINUSTAH memainkan peran penting dalam mendukung proses demokrasi, terutama melalui fasilitasi pemilu dan stabilisasi situasi politik pasca-konflik. Meskipun demikian, demokrasi yang dihasilkan cenderung bersifat prosedural dan belum diiringi oleh penguatan institusi politik, legitimasi pemerintah, dan partisipasi masyarakat yang bermakna. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam penyelenggaraan pemilu tidak secara otomatis menghasilkan konsolidasi demokrasi yang substantif.

Sementara itu, dalam aspek kapasitas institusional, penelitian ini menemukan bahwa meskipun terdapat upaya reformasi dan peningkatan kapasitas, negara Haiti tetap berada dalam kondisi ketergantungan terhadap aktor eksternal. Dominasi organisasi internasional dan NGO dalam penyediaan layanan publik, serta tingginya ketergantungan terhadap bantuan internasional, menunjukkan bahwa proses state-building yang dilakukan belum berhasil menciptakan negara yang mandiri dan kuat. Dengan demikian, intervensi

MINUSTAH cenderung memperkuat fenomena ketergantungan daripada mengatasinya secara fundamental.

Lebih jauh, kritik terhadap MINUSTAH—termasuk pelanggaran HAM oleh personel penjaga perdamaian, skandal penyebaran kolera, serta krisis legitimasi—menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif intervensi dan realitas implementasinya. Kasus-kasus tersebut tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat lokal, tetapi juga mempertanyakan legitimasi dan akuntabilitas intervensi internasional dalam konteks negara fragile.

Berdasarkan temuan tersebut, kontribusi utama penelitian ini terletak pada upayanya untuk mengintegrasikan berbagai dimensi evaluasi MINUSTAH dalam satu kerangka analisis yang komprehensif, serta menempatkannya dalam perdebatan yang lebih luas mengenai efektivitas intervensi internasional, khususnya antara pendekatan stabilisasi dan risiko reproduksi ketergantungan. Penelitian ini juga memperkaya kajian hubungan internasional dengan memberikan analisis empiris terhadap dinamika peacekeeping dan state-building di Haiti.

Namun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini berbasis pada studi literatur, sehingga bergantung pada ketersediaan dan interpretasi sumber sekunder. Kedua, kompleksitas konteks Haiti, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor historis, sosial, dan ekonomi, membuat sulit untuk mengisolasi dampak langsung MINUSTAH secara kausal. Ketiga, keterbatasan data empiris yang konsisten juga menjadi tantangan dalam mengukur efektivitas jangka panjang intervensi.

Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan metodologis yang lebih beragam, seperti studi lapangan atau analisis kuantitatif, guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak intervensi internasional. Selain itu, penelitian ke depan juga dapat mengeksplorasi perbandingan dengan misi penjaga perdamaian di negara lain untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan state-building. Terakhir, penting untuk mengkaji peran aktor lokal secara lebih mendalam guna memahami bagaimana intervensi internasional dapat dirancang secara lebih kontekstual dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Altinger, L., Hidalgo, S., & Lopez-Claros, A. (2008). The humanitarian response index 2007. In *The humanitarian response index 2007: Measuring commitment to best practice* (pp. 3–34). New York, NY: Palgrave Macmillan.
- Archer, C. (2001). *International organizations* (3rd ed.). London, UK: Routledge.
- Barros, F. C. (2020). *Sexual exploitation and abuse by MINUSTAH peacekeepers: A critical assessment of the impact of socio-cultural norms in peacekeeping*. Bochum, Germany: Global Campus Europe.
- Bellamy, A. J. (2008). The responsibility to protect and the problem of military intervention. *International Affairs*, 84(4), 615–639.
- Brierly, J. (1946). The covenant and the charter. *British Yearbook of International Law*, 23, 88–94.
- Burhanuddin, A. (2017). *Studi keamanan dan isu-isu strategis global*. Makassar: Lembaga Kajian dan Pengembangan Pendidikan.
- Calixte-Hallword, M. (2024). Fundamental root of the crisis in Haiti. *Asian Journal of Basic Science & Research*, 6(1), 154–158.
- Carvalho, V. M., & Bascaule, C. (2023). Brazil in MINUSTAH: Exporting a domestic understanding of civil-military relations to a UN peace operation. *Conflict, Security & Development*, 23(2), 153–177.
- Ceïde, L. E. (2008). *Securing Peace in Haiti: An Assessment of the United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH)*. Master's thesis in Peace and Conflict Transformation. Tromsø: University of Tromsø
- Chavallier, G. L. (2011). The “MINUSTAH experience.” In J. H. Thompson (Ed.), *Fixing Haiti: MINUSTAH and beyond* (pp. 117–125). Tokyo: United Nations University Press.
- Cheever, D. S., & Field, H. H. (1954). *Organizing for peace: International organization in world affairs*. Boston, MA: Houghton Mifflin.
- Danish Institute of International Affairs. (1999). *Humanitarian intervention: Legal and political aspects*. Copenhagen, Denmark: Danish Institute of International Affairs.
- Diamint, R. (2007). The 2x9: An incipient security community in Latin America? *Policy Paper*, 18, 1–8.
- Dodds, P. (2017, April 15). UN peacekeepers in Haiti implicated in child sex ring. Retrieved from <https://www.independent.co.uk>
- Dupuy, A. (2007). *The prophet and power: Jean-Bertrand Aristide, the international community, and Haiti*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
- Global Initiative Against Transnational Organized Crime. (2022). *Gangs of Haiti: Expansion, power and an escalating crisis*. Geneva: Global Initiative Against Transnational Organized Crime.

- Goldstein, J., & Keohane, R. O. (1993). *Ideas and foreign policy: Beliefs, institutions, and political change*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Hallward, P. (2004, March 1). Haiti: The coup and its consequences. *The Guardian*. Retrieved from <https://www.theguardian.com>
- Heine, J., & Thompson, A. S. (2011). *Fixing Haiti: MINUSTAH and beyond*. Tokyo: United Nations University Press.
- Heraclides, A., & Dialla, A. (2015). *Humanitarian intervention in the long nineteenth century*. Manchester, UK: Manchester University Press.
- Hills, S. (2022, October 18). Intervention in Haiti: Can the world respond without interfering? Retrieved from <https://www.csmonitor.com>
- International Encyclopedia of the Social Sciences. (1968). *International encyclopedia of the social sciences*. New York, NY: Macmillan.
- Karnanda, F. A (2019) *Security Sector Reform dalam Masalah Pelecehan Seksual Pasca Konflik Haiti. Skripsi Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Andalas*
- Khairani, R. (2014). *The peacekeeping deployment of MINUSTAH in Haiti* (Undergraduate thesis). Universitas Airlangga, Surabaya.
- Kolbe, A. R., & Hutson, R. A. (2006). Human rights abuse and other criminal violations in Port-au-Prince, Haiti: A random survey of households. *The Lancet*, 368(9538), 864–873.
- Kretchik, W. E. (2007). Haiti's quest for democracy: Historical overview. In J. T. Fishel & A. Sáenz (Eds.), *Capacity building for peacekeeping: The case of Haiti* (pp. 8–34). Dulles, VA: Potomac Books.
- Kumaran, S., & de Matos, M. N. (2023). The United Kingdom's doctrine of humanitarian intervention: An emerging norm of international law? *Oxford University Undergraduate Law Journal*, 86–120.
- Lara, G. (2022). *Impact sur le pays hôte des mauvaises conduites de l'ONU : Le cas de la MINUSTAH* (Master's thesis, Université catholique de Louvain).
- Lidico, Y. C. (2001). The justification for humanitarian intervention: Will the continent matter? *International Lawyer*, 35(3), 1027–1050.
- NATO. (2022, July 7). Crisis management. Retrieved from https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49192.htm
- Nugrahani, F. (2014). *Metode penelitian kualitatif dalam penelitian pendidikan bahasa*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Risse, T., & Sikkink, K. (1999). The power of human rights: International norms and domestic change. *Cambridge Studies in International Relations*, 66, 1–38.
- Security Council. (2005). *Report of the Secretary-General on the United Nations Stabilization Mission in Haiti*. New York, NY: United Nations.
- Security Council. (2006). *Report of the Secretary-General on the United Nations Stabilization Mission in Haiti*. New York, NY: United Nations.

- Security Council. (2008). *Report of the Secretary-General on the United Nations Stabilization Mission in Haiti*. New York, NY: United Nations.
- Security Council. (2010). *Report of the Secretary-General on the United Nations Stabilization Mission in Haiti*. New York, NY: United Nations.
- Security Council. (2011). *Report of the Secretary-General on the United Nations Stabilization Mission in Haiti*. New York, NY: United Nations.
- Security Council. (2016). *Report of the Secretary-General on the United Nations Stabilization Mission in Haiti*. New York, NY: United Nations.
- Stotzky, I. P. (1997). *Silencing the guns in Haiti*. Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Subroto, E. (1992). *Pengantar metode penelitian linguistik struktural*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.
- Tariq, S. (2007). Theoretical and historical evolution of international organizations: An analytical study. *Journal of Research (Faculty of Languages & Islamic Studies)*, 12.
- The Transnational Development Clinic. (2013). *Peacekeeping without accountability: The United Nations' responsibility for the Haitian cholera epidemic*. New Haven, CT: Yale Law School.
- UN News. (2004, February 29). Security Council authorizes three-month multinational interim force for Haiti. Retrieved from <https://news.un.org/en/story/2004/02/95652>
- United Nations. (2004). *Security Council authorizes deployment of multinational force to Haiti for 3 months, unanimously adopting resolution 1529 (2004)*. New York, NY: United Nations.
- United Nations Security Council. (2004). *Resolution 1542*. New York, NY: United Nations.
- Wijaya, I. Y. dan Hakim, L. (2023) *Rezim Pengetahuan Perdamaian dan Kekuasaan: Dekonstruksi Klaim Sukses Misi Stabilisasi PBB Di Haiti, 2004-2017*. Skripsi Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada
- Wolfers, A. (1952). National security as an ambiguous symbol. *Political Science Quarterly*, 67(4), 481-502.